

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan kewarganegaraan atau *civic education* merupakan pembelajaran untuk menciptakan warganegara yang baik (*good citizenship*). Dimensi warga Negara yang baik amatlah luas. Pendidikan kewarganegaraan dapat pula diartikan sebagai media untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur serta moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan digunakan sebagai pendidikan yang mengingatkan hak dan kewajiban warga negara untuk melakukan setiap hal senantiasa sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Raharjo (2020) dijelaskan bahwa Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mengalami perkembangan sejarah yang sangat panjang. Dimulai dari kurikulum Rentjana Pelajaran pada tahun 1947, Kurikulum Rentjana Pelajaran Terurai pada tahun 1952, Kurikulum Rentjana Pendidikan pada tahun 1964, kurikulum 1968, Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pada tahun 1975, dilanjutkan dengan Kurikulum PMP 1984 sebagai penyesuaian terhadap Kurikulum 1975, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, dan Kurikulum 2013. Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wadah untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-hari peserta didik sebagai individu dan anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai upaya membentuk warga Negara yang baik, pendidikan kewarganegaraan diajarkan di seluruh Negara di dunia. Pembelajaran ini tentu saja didasari oleh materi, pendekatan dan tata cara yang berbeda di setiap Negara. Selain itu landasan dasar Negara yang ada turut memberikan kontribusi keragaman pola pendidikan kewarganegaraan di masing-masing Negara. Meskipun perkembangan PKN di Indonesia sangat dipengaruhi dengan ilmu kewarganegaraan dari Amerika,

akan tetapi juga tidak mengabaikan pendidikan kewarganegaraan dari Negara-negara baik dari aspek konten maupun metode pembelajarannya (Wahab, 2011). Lebih lanjut sebagaimana diketahui bahwa bahan atau kajian materi pelajaran PKn di Indonesia bersifat doktrin. Hal ini disebabkan bahwa materi dalam mata pelajaran PKn dianggap telah diterima secara umum oleh masyarakat Indonesia, yakni bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Pada prosesnya, prinsip indoktrinasi atau istilah lainnya adalah prinsip “*what to think*” tersebut bergeser menjadi lebih menekankan aspek kebebasan, keterbukaan, atau demokratis, dengan istilah lainnya adalah “*how to think*”. Metode pembelajaran dalam PKn yang semula berprinsip untuk mempelajari apapun yang telah disiapkan, disusun, maupun ditetapkan oleh Negara, kini berubah menjadi bagaimana bahan-bahan yang ditetapkan dalam kurikulum dikembangkan demi mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Dalam pendekatan pembelajaran tersebut, guru tidak lagi penyambung informasi dalam teks materi yang telah disiapkan, akan tetapi juga berperan sebagai pengembang kurikulum yang ada. Dengan prinsip ini siswa didorong untuk berpikir, berusaha memaksimalkan kemampuannya, serta melakukan analisis untuk menemukan sendiri dan melaporkan hasil temuannya dalam suatu materi (Wahab, 2011). Metode ini juga dikenal dengan metode saintifik (*scientific method*). Pada akhirnya metode pembelajaran inilah yang dikembangkan sampai saat ini dalam pembelajarn PKn di sekolah.

Pengembangan kurikulum PKn bertujuan untuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 37 UU No tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dalam penjelasan pasal 37 disebutkan bahwa “...dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Penjelasan tersebut tampak mengarahkan bahwa pendidikan kewarganegaraan hendaknya menjadi tempat pembelajaran yang edukatif dalam mengembangkan siswa menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki komitmen terhadap Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, untuk mengakomodasi perkembangan dan perwujudan pendidikan sebagai proses pencerdasan kehidupan bangsa secara komprehensif, maka substansi dan nama mata pelajaran yang sebelumnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dikemas dalam Kurikulum 2013 menjadi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

PPKn dirancang untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan, diantaranya adalah pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), serta keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*). Keterampilan kewarganegaraan secara spesifik meliputi keterampilan intelektual (*intellectual skill*); dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skill*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari kompetensi tersebut maka dirumuskan tujuan dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang tercantum dalam kurikulum 2013 adalah menjadikan peserta didik sebagai warganegara yang memiliki tiga kemampuan utama, yakni 1) Sikap kewarganegaraan, yang di dalamnya mencakup keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan (*civic confidence, civic commitment, and civic responsibility*); 2) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); 3) keterampilan kewarganegaraan yang mencakup kecakapan kewarganegaraan dan partisipasi kewarganegaraan (*civic competence and civic responsibility*).

Cogan (1998) menjelaskan bahwa PPKn sebagai mata pelajaran dirancang untuk mempersiapkan generasi muda berperan aktif mereka di masyarakat setelah mereka dewasa. Muatan materi yang harus dimasukkan dalam buku teks menurut Permendiknas No. 11 tahun 2005 diantaranya dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, serta potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Dari muatan materi yang harus disertakan dalam buku teks di atas, dapat dipahami bahwa isi dalam materi buku teks ditujukan untuk bekal siswa dalam kehidupan di masyarakat. Seluruh ketentuan yang berkaitan dengan kurikulum dan berkenaan dengan materi PPKn dimuat dalam Permendikbud turunan dari PP nomor 32 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari PP nomor 19 tahun 2005, dan kembali diubah

menjadi PP nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, dimana ketentuan tersebut berkaitan dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Silabus, Buku Teks Siswa dan Buku Pedoman Guru, serta Pedoman Implementasi Kurikulum. Dengan kata lain seluruh penjelasan mengenai PPKn secara utuh dalam konteks sistem pendidikan dan kurikulum secara nasional sudah diatur dalam regulasi yang lengkap.

Buku teks merupakan salah satu media dalam pembelajaran yang digunakan oleh siswa untuk mencapai tujuan kurikulum. Selain itu, buku teks juga merupakan salah satu sumber belajar siswa. Dalam sejarah perkembangannya, keberadaan buku teks telah hadir bersamaan dengan munculnya sekolah-sekolah sejak abad ke-16 Masehi. Keberadaan buku teks senantiasa disesuaikan dengan kurikulum pembelajaran yang dirancang disetiap waktu mengikuti kebutuhan zaman. Oleh karena itu, sebagai sumber belajar, penyusunan buku teks tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan belajar siswa serta memenuhi tantangan zaman yang dihadapi. Karena buku teks yang baik adalah buku yang dapat dipahami dengan mudah oleh pemakainya.

Dalam UU nomor 3 tahun 2017 tampak jelas di antara tujuan penyusunan buku teks adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa, serta menumbuhkan budaya literasi warga Negara Indonesia. Penumbuhan budaya literasi sangat digalakkan karena berkenaan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI) yang dilakukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa secara nasional kemampuan matematis siswa Indonesia sebanyak 77,13%, kemampuan sains sebanyak 73,61%, dan kemampuan membaca sebanyak 46,83%. (GLN, 2017). Fakta ini cukup memprihatinkan, mengingat pentingnya literasi dalam berbagai bidang kehidupan saat ini. Arus informasi masuk ke Negara kita dari berbagai arah tanpa bisa dibendung. Kemampuan literasi lah yang akhirnya menjadi tameng pertahanan terakhir seseorang dalam memfilter informasi yang tepat dan kurang tepat untuk dikonsumsi. Manfaat literasi ini sebagaimana dijelaskan oleh Stripling (1992) (Dalam Kusmana, 2017, hlm.142) bahwa pentingnya literasi adalah untuk

memahami informasi yang baru diperoleh dengan baik dan selanjutnya dapat kita jadikan dasar untuk menjalani kehidupan. Literasi berfungsi sebagai jembatan sekaligus pintu gerbang untuk mendapatkan informasi baru dan memanfaatkannya dengan baik sesuai dengan kebutuhan kita. Keterampilan literasi disusun dari proses mengetahui, memahami dan memaknai (Puskurbuk, 2017). Dengan kata lain bahwa proses menguasai kemampuan literasi harus dimulai dengan mengetahui, memaknai dan memahami.

Kemampuan membaca siswa sangat mempengaruhi penalaran terhadap informasi yang diperoleh. Diantara hal-hal yang membuat siswa mampu membaca adalah tingkat keterbacaan buku yang baik. Puspendik Kemendikbud dalam program *Indonesian National Assessment Program (INAP)* melakukan penelitian pada tahun 2016 menunjukkan angka kemampuan membaca, matematika dan sains pada siswa SD Kelas IV. Hasilnya menunjukkan 46,83% dalam kategori kurang, 47,11% dalam kategori cukup, dan 6,06% dalam kategori baik pada kemampuan membaca (GLS, 2018). Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam menjawab persoalan yang dihadapi serta tantangan-tantangan yang muncul. Buku teks mata pelajaran diharapkan menjadi solusi pada peningkatan kemampuan membaca siswa. Terutama untuk mewujudkan nawacita kemendikbud yang dicanangkan, maka buku teks mata pelajaran PPKn menjadi kesimpulan akhir dalam menjawab tujuan besar tersebut.

Literasi budaya dan kewargaan merupakan kemampuan memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa, dimana sikap tersebut ditunjukkan dengan menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pentingnya penguasaan literasi budaya dan kewargaan bagi siswa merupakan jawaban atau solusi untuk mengantisipasi konflik dari dalam negeri serta tuntutan kemampuan beradaptasi dalam perkembangan global. Dengan demikian literasi budaya dapat diartikan sebagai kemampuan literasi untuk mempersiapkan siswa menghadapi berbagai permasalahan dalam masyarakat. Persiapan menghadapi kehidupan masyarakat sangatlah penting, karena banyaknya keberagaman dalam masyarakat yang berkembang. Berbagai dampak positif dari adanya keberagaman di Indonesia diantaranya adalah adanya kekayaan budaya yang dimiliki.

Kemajemukan yang ditimbulkan akibat keberagaman budaya dapat menimbulkan rasa bangga dan saling memiliki yang tinggi. Ragam budaya ditunjukkan melalui ekspresi setiap suku, dimana segala bentuk perilaku dan aktifitasnya dipengaruhi oleh ide maupun gagasan tertentu. Akhirnya tindakan ini menghasilkan karya-karya tertentu, misalnya ragam lagu daerah, seni batik, makanan khas, dan lain sebagainya (PDSPK, 2016). Nilai positif keberagaman tentu saja menciptakan rasa kebersamaan, persaudaraan, sekaligus persatuan dan kesatuan yang kuat bagi bangsa Indonesia. Ikatan persatuan dan kesatuan ini dikukuhkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada pita yang dicengkeram oleh Burung Garuda Pancasila. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sekaligus menjadi identitas bagi bangsa Indonesia. Identitas ini sekaligus menjelaskan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan yang bersatu dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Selain itu, dampak positif lainnya adalah mampu meningkatkan daya Tarik bangsa di mata masyarakat internasional. Daya Tarik ini bernilai positif bagi peningkatan pendapatan Negara melalui pariwisata budaya Indonesia.

Meski banyak nilai positif dari adanya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, akan tetapi tetap ada dampak negatif yang muncul. Abu ahmadi (2007) (dalam Ridwan, 2015) menuliskan setidaknya terdapat tiga dampak negatif yang muncul akibat keberagaman budaya dalam masyarakat, yaitu adanya sikap fanatisme kesukuan (*ethnosentrisme*), konflik kebudayaan (*culture conflict*), serta munculnya guncangan kebudayaan (*culture shock*). Konflik kebudayaan merupakan permasalahan yang muncul akibat pertentangan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Menurut Suryandari (2019) Konflik budaya sering ditimbulkan akibat perbedaan orientasi nilai yang muncul dalam masyarakat. Misalnya kelompok atau individu dalam masyarakat yang tidak mempertimbangkan sisi sejarah suatu budaya tertentu akan tampak kurang menghormati terhadap cara-cara tradisional suatu budaya. Tindakan tersebut tentu sangat rawan menimbulkan konflik budaya dalam masyarakat. Lemahnya kesadaran akan keberagaman dalam masyarakat menjadi salah satu penyebab berbagai konflik yang muncul di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara umum jumlah perkelahian

antar masyarakat pada tahun 2018 menunjukkan bahwa perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, kemudian disusul oleh perkelahian warga antar desa/kelurahan. Dalam data tersebut dijelaskan bahwa persentase desa/kelurahan yang mengalami perkelahian antar suku pada tahun 2011 adalah sebesar 0,13%, pada tahun 2014 menurun menjadi 0,9% dan kembali meningkat pada tahun 2018 dengan hasil survey sebesar 0,13%.



Sumber: BPS 2021.

Gambar 1.1 Data Persentase Desa/Kelurahan di Seluruh Indonesia yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal Menurut Tipenya pada tahun 2011, 2014, dan 2018

Dari berbagai macam tantangan atau dampak negatif dalam keberagaman pada masyarakat Indonesia, dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari keragaman budaya dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir atau menghindari permasalahan-permasalahan tersebut. Upaya untuk melestarikan budaya menurut Sendjaja (1994) dalam Nahak (2019) dilakukan dengan dua cara. Yaitu dengan penanaman pengalaman budaya (*culture experience*) dan penanaman pengetahuan budaya (*culture knowledge*). Pengalaman budaya diaplikasikan

dengan cara pelibatan langsung dalam sebuah kegiatan kebudayaan. Misalnya adalah mengikuti pelatihan tarian budaya tertentu untuk ditampilkan pada perayaan suatu budaya. Hal ini secara tidak langsung merupakan bentuk pelestarian budaya dengan cara memberikan pengalaman budaya. Penanaman pengetahuan budaya atau *culture knowledge* merupakan pelestarian budaya dengan cara membuat suatu pusat informasi yang berguna untuk berbagai kepentingan edukasi. Dengan demikian para generasi muda dapat dengan mudah mengenali budayanya masing-masing.

Selain permasalahan yang timbul akibat keragaman suku agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat, masalah lain yang ditimbulkan juga akibat minimnya pemahaman dalam menunaikan hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Diantaranya adalah sikap apatis terhadap partisipasi politik. Sikap apatis ini berbahaya karena dampaknya sangat sistemik. Dimulai dari rendahnya literasi politik dalam diri masyarakat. Pada tahun 2018, Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila (UKP PIP) melakukan survei pada 100 orang responden mengenai pengetahuan terhadap Pancasila dan Lagu Kebangsaan. Hasil yang diperoleh cukup mencengangkan. 18 dari 100 orang responden tidak mengetahui lagu kebangsaan Indonesia, dan 24 orang dari 100 orang responden tidak hafal sila-sila dalam Pancasila (Jpnn, 2018).

Munculnya orang-orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu merupakan bentuk perilaku apatisisme terhadap tema pemilihan. Perilaku ini juga disebabkan karena rendahnya literasi politik atau melek politik dalam masyarakat. Kantaprawira (2004) dalam Arranirri (2015) mengemukakan bahwa melek politik dapat diwujudkan dengan peningkatan pengetahuan politik dalam masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dengan maksimal. Varma (2001) menjelaskan bahwa sikap acuh tak acuh terhadap politik yang berkembang dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: apatisisme politik, sinisme politik, alienasi atau merasa terasing dalam kehidupan politik, dan anomi. Dari seluruh penyebab golput pada masyarakat, tampak bahwa apatisisme politik merupakan penyebab golput yang paling banyak ditemui dalam masyarakat. Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada bulan

Februari 2019 yang melibatkan 1.200 Responden tersebut diketahui bahwa sebanyak 50,6% masyarakat Indonesia tidak tahu dan tidak dapat menyebutkan dengan tepat kapan pilpres akan dilaksanakan. Pada 18 April 2019 LSI kembali mengumumkan hasil survei mengenai jumlah golput pada pemilu 2019 sebanyak 19,27% pada pemilihan Presiden dan wakil Presiden, serta 30,05% pada pemilu legislatif.

Dari data di atas disimpulkan bahwa pentingnya peningkatan literasi budaya dan kewargaan dalam masyarakat, khususnya siswa selaku generasi muda, calon pemilih muda di masa yang akan datang, serta pemegang tanggung jawab menjaga keamanan dan ketentraman bersama dalam hidup berbangsa dan bernegara. Buku teks PPKn memegang peranan penting dalam menyikapi berbagai permasalahan yang muncul sebagai dampak rendahnya literasi budaya dan kewargaan dalam masyarakat. Penelitian yang lebih dahulu dilakukan oleh Hidayatul Wakhidah (2014) mengenai: Analisis Kelayakan Buku Teks Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Kelas VII Kurikulum 2013 diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa catatan belum sesuai atau belum memenuhi standar kelayakan pada buku teks PPKn kelas VII, diantaranya adalah (1) aspek kesesuaian isi/ materi dengan kurikulum dan keterampilan partisipasi belum memenuhi standar kelayakan, (2) aspek pendekatan *scientific* belum memenuhi standar kelayakan, (3) aspek penilaian autentik telah memenuhi standar kelayakan, (4) aspek bahasa belum memenuhi standar kelayakan, (5) aspek grafika belum memenuhi standar kelayakan. (6) faktor-faktor penyebab munculnya permasalahan buku tersebut adalah penyusunan buku teks masih terjebak pada aspek kognitif.

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti tertarik untuk mengembangkan model buku teks PPKn berdasarkan literasi budaya dan kewargaan. Pentingnya dukungan literasi budaya dan kewargaan dalam buku teks PPKn berdasarkan literasi budaya dan kewargaan berkaitan dengan dimensi kurikuler mata pelajaran PPKn, metode pembelajaran PPKn, esensi penggunaan buku teks dalam pembelajaran, serta mempertimbangkan penyusunan buku teks berdasarkan UU nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan nasional serta indikator literasi budaya dan kewargaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mengenai “Pengembangan Model Buku Teks PPKn SMP Kelas VII Berdasarkan literasi budaya dan kewargaan (pada materi Keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika). Dalam penelitian ini, peneliti berupaya untuk mengembangkan model buku teks dalam bentuk pedoman penyusunan dan contoh Bab materi dalam buku teks PPKn berdasarkan literasi budaya dan kewargaan, serta efektifitas pengaplikasiannya dalam pembelajaran.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, disimpulkan beberapa rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana deskripsi penerapan Literasi Budaya dan Kewargaan dalam pembelajaran menggunakan buku teks di SMP Islam Az Zahra Bandar Lampung?
- 2) Bagaimana Pengembangan Model buku teks PPKn SMP Kelas VII Berdasarkan Literasi Budaya dan Kewargaan pada materi Keberagaman SARA Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika?
- 3) Bagaimana efektivitas buku teks PPKn SMP Kelas VII Berdasarkan Literasi Budaya dan Kewargaan dalam menumbuhkan kepekaan siswa terhadap budaya nasional pada materi Keberagaman SARA Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Ada dua klasifikasi tujuan dalam penelitian ini, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk inovasi pembelajaran berupa pengembangan model Buku Teks PPKn Kelas VII berdasarkan Literasi Budaya dan Kewargaan pada materi Keberagaman SARA Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

1.3.2 Tujuan Khusus

Ada beberapa tujuan khusus dari penelitian ini, meliputi:

- 1) Untuk mengetahui deskripsi literasi budaya dan kewargaan dalam pembelajaran menggunakan buku teks di SMP Islam Az Zahra Bandar Lampung.
- 2) Untuk mengetahui pengembangan model buku teks PPKn SMP Kelas VII Berdasarkan Literasi Budaya dan kewargaan pada materi Keberagaman SARA Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
- 3) Untuk menganalisis efektivitas buku teks PPKn SMP Kelas VII berdasarkan literasi budaya dan kewargaan dalam menumbuhkan kepekaan siswa terhadap budaya nasional pada materi Keberagaman SARA Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini diklasifikasi dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat dari segi Teori

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan keilmuan dan pengetahuan yang berkenaan dengan pengembangan model buku teks berdasarkan kategori budaya dan kewargaan. Memberikan contoh model materi dalam buku teks PPKn SMP Kelas VII berdasarkan literasi budaya dan kewargaan pada materi Keberagaman SARA Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika kepada guru sehingga memudahkan dalam kegiatan pembelajaran.

1.4.2 Manfaat dari segi Kebijakan

Memberikan panduan umum tentang dasar pembuatan buku teks PPKn berdasarkan literasi budaya dan kewargaan. Selain itu juga menjadi dasar pengembangan buku teks PPKn berdasarkan literasi budaya dan kewargaan. Selanjutnya, penelitian ini memberi manfaat sebagai bahan kajian literasi budaya dan kewargaan bagi siswa sekolah menengah pertama. Terakhir, menjawab tantangan kebutuhan zaman dalam era revolusi industri 4.0.

1.4.3 Manfaat dari Segi Praktik

Manfaat penelitian ini dari segi praktik dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain:

1) Manfaat Bagi Guru

Bagi guru, penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu contoh pengembangan materi pelajaran yang dapat dijadikan untuk acuan pembelajaran. Selain itu juga dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana penerapan literasi budaya dan kewargaan pada materi keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menjadi salah satu referensi mata pelajaran untuk diaplikasikan dengan model pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*).

2) Manfaat Bagi Siswa

Bagi siswa penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber belajar pada materi keberagaman SARA dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Penelitian ini juga bermanfaat untuk mengembangkan nilai-nilai literasi budaya dan kewargaan bagi siswa berupa nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman sebaya dan lingkungan tempat tinggalnya.

3) Manfaat Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi calon peneliti lain yang ingin mengembangkan model buku teks PPKn SMP Kelas VII atau yang lainnya berdasarkan literasi budaya dan kewargaan pada semua materi di dalamnya.

4) Manfaat Bagi Lembaga

Bagi sekolah, penelitian ini menjadi referensi pengembangan literasi Budaya dan nilai-nilai kewargaan di sekolah. Bagi pemerintah, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran dan inspirasi mengenai pengembangan model buku teks PPKn berdasarkan literasi budaya dan kewargaan.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Merupakan penjabaran mengenai urutan penelitian yang dilakukan dalam setiap bab serta bagian demi bagian pada penelitian ini. Adapun langkah-langkah penulisannya terdiri atas lima bagian deskripsi di bawah ini:

1.5.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini pada dasarnya bab perkenalan, merupakan pengantar dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Pada bagian ini dideskripsikan dalam lima sub penjabaran, yaitu latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, serta yang terakhir adalah struktur organisasi tesis.

1.5.2 Bab II Kajian Pustaka

Seluruh variabel penelitian yang akan diteliti dibahas dalam bab dua. Ini menjadikannya sangat krusial, sebab seluruh konsep dalam penelitian dibahas dan dijabarkan secara detail di dalamnya. Melalui tinjauan berbagai teori dapat dikemukakan pertalian antar permasalahan serta kedudukannya dalam bidang kajian yang diteliti mengenai konsep yang berhubungan dengan Buku Teks, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta Literasi Budaya dan Kewargaan.

1.5.3 Bab III Metode Penelitian

Di sini peneliti mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana rancangan alur penelitian dibuat. Secara eksplisit dijabarkan bahwa penelitian ini menggunakan metode campuran atau *mix method*. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengembangkan sebuah produk. Oleh karena itu penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian pengembangan atau *research and development/R&D*. Model ADDIE dipilih dengan pertimbangan langkah pengembangan yang sistematis. Analisis data dilakukan dengan dua pendekatan. Hal ini disebabkan adanya dua jenis data penelitian yang diperoleh. Yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan teknik analisis wacana atau *content analysis* Sementara data kuantitatif dianalisis menggunakan uji efektivitas, uji normalitas, uji homogenitas, uji persamaan rata-rata hasil belajar, serta uji N-Gain score.

1.5.4 Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Menyampaikan temuan hasil pengkajian data seluruhnya disampaikan di sini. Pada penelitian dengan metode pengembangan ini, peneliti menyajikan data dalam beberapa tahapan, yaitu; eksplorasi, komunikasi, kalkulasi, penyimpanan dan dekorasi. Secara umum peneliti menjelaskan data yang diperoleh, kemudian mengejawantahkan secara deskriptif guna menjawab pertanyaan dalam penelitian ini.

1.5.5 Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi.

Simpulan, dampak serta saran penelitian dijabarkan secara lugas dan detail dalam bab lima. Selain itu peneliti juga menjelaskan hasil temuan penting dan berbagai analisis yang sudah dilakukan. Rekomendasi juga disertakan dalam bab ini sebagai rujukan penelitian yang akan dilanjutkan pada penelitian mendatang.